

KEBIJAKAN IMPOR BERAS DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Deris Desmawan¹, Kelompok 5 Ekonomi Pembangunan²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: deridesmawan@untirta.ac.id¹, 5553240002@student.untirta.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan impor beras dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tantangan yang dihadapi sektor pertanian domestik, termasuk fluktuasi produksi, perubahan iklim, dan bencana alam yang mengancam ketersediaan beras. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan impor beras menjadi salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan impor beras dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga, ketergantungan yang berlebihan pada impor berpotensi mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya transparansi, koordinasi yang buruk antara institusi terkait, dan dampak terhadap produksi domestik. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan impor dengan upaya peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi sumber pangan, serta penguatan infrastruktur pertanian. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan kebijakan impor beras dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan di Indonesia, sehingga memenuhi kebutuhan pangan saat ini dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan.

Kata Kunci : Impor Beras, Indonesia, Kebijakan, Ketahanan Pangan.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan berarti memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang cukup terhadap pangan yang sehat, bergizi, dan terjangkau. Namun, di balik potensi besar sebagai produsen beras, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan beras nasional. Salah satu kebijakan yang sering diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan dan harga adalah impor beras. Meski tujuannya adalah menjaga ketersediaan pangan dalam negeri, kebijakan impor beras kerap menuai kontroversi karena dianggap mengancam keberlanjutan sektor pertanian domestik dan merugikan petani lokal (Salasa, 2021).

Impor beras di Indonesia menjadi perdebatan panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, petani, pengusaha, serta masyarakat luas. Salah satu alasan utama pemerintah melakukan impor adalah untuk menstabilkan harga beras dan menjaga cadangan pangan nasional. Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) sering menjadi sorotan dalam pengambilan keputusan impor, terutama ketika stok beras dalam negeri diprediksi tidak mencukupi kebutuhan, terutama saat musim paceklik atau ketika bencana alam terjadi. Di sisi lain, kebijakan ini juga dilihat sebagai langkah pragmatis untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Namun, ketergantungan terhadap impor dapat menciptakan kerentanan baru, terutama ketika terjadi krisis pangan global yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas.

Salah satu tantangan terbesar dari kebijakan impor beras adalah dampaknya terhadap petani lokal. Banyak studi menunjukkan bahwa masuknya beras impor ke pasar domestik sering kali menyebabkan harga beras lokal jatuh, yang pada akhirnya merugikan petani yang sudah berjuang dengan biaya produksi yang tinggi. Selain itu, petani Indonesia umumnya menghadapi berbagai kendala seperti akses terbatas terhadap teknologi pertanian modern, permodalan, serta infrastruktur yang kurang memadai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian, sehingga berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor ini. Dengan demikian, kebijakan impor yang tidak diimbangi dengan penguatan sektor pertanian domestik bisa memperparah ketergantungan pangan luar negeri dan mengancam ketahanan pangan berkelanjutan di masa depan (Widiana et al., 2022).

Selain faktor domestik, dinamika perdagangan internasional juga mempengaruhi kebijakan impor beras Indonesia. Perjanjian dagang internasional, perubahan kebijakan proteksi pangan negara lain, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turut menentukan harga dan volume beras impor yang masuk ke Indonesia. Di satu sisi, liberalisasi perdagangan dapat membuka peluang untuk mengakses beras dengan harga lebih murah, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko pada stabilitas pasar domestik. Misalnya, ketika negara-negara eksportir beras utama seperti Thailand dan Vietnam mengalami gagal panen, harga beras global cenderung naik, yang kemudian berdampak pada biaya impor Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasar global tidak selalu menjamin keamanan pasokan, terutama dalam situasi yang tidak terduga.

Di tingkat kebijakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menyeimbangkan antara impor beras dan penguatan sektor pertanian lokal. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk penetapan harga acuan pembelian beras oleh Bulog, pemberian subsidi pupuk dan benih, serta program modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan digitalisasi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keberlanjutan program, dan efisiensi distribusi bantuan kepada petani. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah juga menjadi

hambatan dalam menciptakan iklim usaha pertanian yang kondusif. Akibatnya, banyak petani yang masih bergantung pada cara-cara tradisional yang kurang produktif dan berisiko tinggi terhadap perubahan iklim (Darma et al., 2020).

Di tengah kompleksitas ini, diperlukan kebijakan impor yang lebih adaptif dan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif (ketersediaan pangan), tetapi juga kualitatif (kesejahteraan petani dan kualitas pangan). Kebijakan ini harus didukung oleh data yang akurat dan prediksi yang tepat terkait produksi beras dalam negeri agar keputusan impor dapat dilakukan secara bijaksana. Penguatan sistem informasi pertanian dan perbaikan dalam manajemen stok pangan menjadi krusial untuk menghindari keputusan impor yang berlebihan atau kurang tepat waktu. Selain itu, perlunya peningkatan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan beras nasional oleh Bulog juga menjadi sorotan penting untuk meminimalkan kerugian akibat penyimpanan yang tidak efisien.

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, pemerintah perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan varietas padi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, penyakit, dan hama. Pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan juga menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi petani mengenai teknik budidaya modern, manajemen risiko pertanian, serta akses terhadap pasar juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pertanian Indonesia. Pada akhirnya, kebijakan impor beras harus ditempatkan dalam konteks pembangunan pertanian yang menyeluruh, dengan fokus pada pemberdayaan petani dan peningkatan ketahanan pangan jangka panjang (McCulloch & Petter Timmer, 2008).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan impor beras di Indonesia dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan impor beras saat ini telah memberikan dampak terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan stabilitas pasar. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam kebijakan ini serta memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan sektor pertanian domestik. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pangan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis kebijakan impor beras dalam konteks ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Data dikumpulkan melalui kajian berbagai sumber literatur yang mencakup artikel jurnal, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, serta studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema kunci terkait kebijakan impor beras, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan impor beras dan ketahanan pangan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber data yang beragam, penelitian ini berupaya menggali perspektif yang berbeda mengenai efektivitas kebijakan dan implikasinya terhadap sektor pertanian domestik serta masyarakat. Hasil analisis akan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan impor beras dapat disusun dan dilaksanakan secara lebih efektif untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pangan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Impor Beras terhadap Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia

Kebijakan impor beras merupakan salah satu instrumen pemerintah Indonesia dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah berbagai tantangan produksi dalam negeri. Meski bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, kebijakan ini seringkali memicu perdebatan, terutama mengenai dampaknya terhadap ketahanan pangan berkelanjutan. Dampak kebijakan impor beras terhadap ketahanan pangan Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan (Aryani, 2021).

1. Dampak Ekonomi: Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan

Salah satu tujuan utama kebijakan impor beras adalah untuk menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Ketika produksi beras dalam negeri tidak mencukupi, terutama saat musim paceklik atau bencana alam yang mempengaruhi hasil panen, impor menjadi langkah yang diambil untuk menambah pasokan dan menekan harga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga beras tetap terjangkau bagi konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok.

Namun, meskipun kebijakan ini efektif dalam jangka pendek untuk menstabilkan harga, dampaknya terhadap ekonomi pertanian domestik sering kali kontraproduktif. Masuknya beras impor dalam jumlah besar dapat menyebabkan harga beras lokal turun drastis, sehingga pendapatan petani menurun. Petani yang sudah berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti biaya produksi yang tinggi dan akses terbatas terhadap teknologi pertanian, semakin tertekan oleh persaingan dengan beras impor yang harganya sering kali lebih murah. Kondisi ini memicu penurunan motivasi petani untuk berproduksi, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan sektor pertanian domestik (Aziza et al., 2024).

Di samping itu, ketergantungan pada impor beras juga berpotensi menciptakan kerentanan baru dalam ketahanan pangan nasional. Dalam kondisi pasar global yang tidak stabil, seperti ketika terjadi krisis pangan global, kebijakan proteksi pangan oleh negara eksportir, atau fluktuasi harga komoditas, Indonesia berisiko mengalami kesulitan untuk mengamankan pasokan beras dengan harga yang wajar. Situasi ini dapat memperburuk defisit perdagangan dan mengganggu keseimbangan neraca pembayaran negara. Ketergantungan pada impor mengurangi insentif untuk mengembangkan kapasitas produksi dalam negeri, yang pada akhirnya merugikan ekonomi secara keseluruhan.

2. Dampak Sosial: Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Sosial Masyarakat

Impor beras memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani, yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Dengan sekitar 38 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, kebijakan yang melemahkan harga jual beras lokal berimplikasi langsung pada pendapatan petani dan kualitas hidup mereka. Banyak petani kecil yang hanya memiliki lahan terbatas bergantung sepenuhnya pada hasil panen mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika harga beras anjlok akibat impor, daya beli petani menurun, dan banyak dari mereka yang terjatuh utang karena gagal menutup biaya produksi.

Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Petani yang kehilangan pendapatan cenderung mengurangi investasi dalam produksi, misalnya dengan mengurangi penggunaan pupuk, bibit unggul, atau teknologi pertanian yang lebih efisien. Dalam jangka panjang, ini mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian dan kualitas hasil panen. Selain itu, generasi muda menjadi semakin tidak tertarik untuk melanjutkan usaha tani karena melihat sektor ini tidak menjanjikan keuntungan, sehingga regenerasi petani menjadi terkendala.

Di sisi konsumen, impor beras yang berfungsi menstabilkan harga dapat memberikan

manfaat jangka pendek, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat merugikan karena ketergantungan pada impor beras membuat masyarakat rentan terhadap volatilitas harga global. Selain itu, beras impor sering kali tidak sesuai dengan preferensi rasa dan nutrisi masyarakat lokal, yang terbiasa dengan beras hasil produksi dalam negeri.

3. Dampak Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya dan Ketahanan Ekosistem

Ketahanan pangan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga dengan bagaimana produksi pangan dikelola secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, impor beras memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem pertanian di Indonesia. Ketika kebijakan impor lebih diutamakan daripada pengembangan produksi domestik, hal ini dapat mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian karena rendahnya insentif bagi petani untuk terus bertani (Kurniawan & Fitri, 2024).

Alih fungsi lahan pertanian menjadi area perkotaan, industri, atau infrastruktur dapat mengurangi luas lahan sawah yang tersedia dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pestisida berlebihan dan penebangan hutan untuk lahan pertanian, dapat memperparah degradasi lingkungan dan menurunkan kualitas tanah. Kondisi ini berakibat langsung pada penurunan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketergantungan terhadap input pertanian yang merusak lingkungan.

Selain itu, produksi beras dalam negeri juga menghadapi tantangan terkait perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan yang semakin sering terjadi. Dalam hal ini, kebijakan impor beras seharusnya diimbangi dengan strategi mitigasi perubahan iklim yang kuat untuk melindungi sektor pertanian lokal. Sayangnya, fokus yang terlalu besar pada impor sering kali mengalihkan perhatian dan sumber daya dari upaya peningkatan ketahanan iklim dan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

4. Dampak terhadap Kebijakan: Tantangan Koordinasi dan Efektivitas Implementasi

Dampak lain dari kebijakan impor beras terhadap ketahanan pangan berkelanjutan terletak pada aspek kebijakan dan regulasi itu sendiri. Kebijakan impor sering kali diambil sebagai solusi cepat tanpa disertai perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dengan pengembangan pertanian nasional. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog, yang sering kali memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda dalam penanganan pangan nasional.

Akibatnya, kebijakan yang tumpang tindih dan kurang harmonis menjadi hambatan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan berkelanjutan. Misalnya, penetapan waktu dan volume impor yang tidak tepat dapat mengakibatkan beras impor masuk pada saat panen raya, sehingga menekan harga beras lokal dan merugikan petani. Selain itu, kebijakan yang kurang transparan dan akuntabel dalam proses pengambilan keputusan impor sering kali menimbulkan masalah tata kelola, termasuk isu korupsi dan kepentingan kelompok tertentu.

Pengelolaan stok pangan nasional juga menjadi tantangan tersendiri. Bulog sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dan distribusi cadangan beras nasional sering kali kesulitan dalam menjaga kualitas beras yang disimpan dalam jangka waktu lama. Masalah ini semakin diperburuk dengan terbatasnya infrastruktur penyimpanan yang memadai, sehingga beras yang diimpor atau diserap dari petani lokal sering kali mengalami penurunan mutu sebelum sampai ke konsumen.

5. Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Alternatif Terhadap Ketergantungan Impor

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang lebih holistik dan berfokus pada penguatan sektor pertanian

domestik. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi, seperti pengembangan varietas padi unggul yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan serangan hama. Investasi dalam mekanisasi pertanian, digitalisasi sistem pertanian, dan perluasan akses petani terhadap permodalan dan pasar juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian domestik.

Di sisi kebijakan, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam tata kelola pangan, termasuk perbaikan dalam perencanaan dan prediksi kebutuhan impor yang berbasis data akurat. Penyusunan kebijakan yang lebih inklusif, dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama seperti petani, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil, akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan impor harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan (Sutardi et al., 2022).

Pengembangan sistem cadangan pangan yang lebih modern dan efisien juga menjadi prioritas. Bulog perlu didukung dengan fasilitas penyimpanan yang lebih canggih dan sistem distribusi yang lebih cepat untuk memastikan kualitas beras yang disimpan tetap terjaga. Selain itu, diversifikasi pangan juga perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok, dengan mempromosikan konsumsi bahan pangan lokal lainnya seperti jagung, sagu, atau umbi-umbian.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Impor Beras di Indonesia

Kebijakan impor beras di Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan impor beras di Indonesia (Prabowo & Pudjianto, 2023).

1. Ketidakpastian Produksi dalam Negeri

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan impor beras adalah ketidakpastian produksi beras dalam negeri. Produksi beras di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cuaca, bencana alam, serangan hama, dan penyakit tanaman. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu menyebabkan sering terjadinya banjir, kekeringan, atau cuaca ekstrem lainnya yang dapat merusak tanaman padi dan mengurangi hasil panen. Ketidakpastian ini menyulitkan pemerintah dalam membuat prediksi yang akurat mengenai kebutuhan impor dan waktu yang tepat untuk melakukannya.

Selain faktor alam, ketidakpastian produksi juga disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan rendahnya kualitas infrastruktur pertanian. Banyak petani di Indonesia masih menggunakan teknik bercocok tanam tradisional dengan produktivitas rendah. Akses terhadap teknologi modern, seperti varietas padi unggul yang tahan terhadap hama dan perubahan iklim, pupuk yang berkualitas, serta mekanisasi pertanian yang efisien, masih terbatas. Rendahnya investasi dalam penelitian dan pengembangan pertanian turut memperburuk kondisi ini, sehingga produktivitas padi domestik tidak optimal dan seringkali tidak mampu memenuhi permintaan (Chaireni et al., 2020).

2. Ketergantungan pada Impor dan Volatilitas Pasar Global

Ketergantungan pada impor beras menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan di pasar internasional. Situasi ini diperparah oleh volatilitas harga pangan global yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca di negara produsen, kebijakan proteksionis negara eksportir, perubahan permintaan global, serta gangguan geopolitik. Misalnya, jika negara-negara pengekspor utama seperti Thailand, Vietnam, atau India menerapkan kebijakan pembatasan ekspor untuk menjaga ketahanan pangan domestik mereka, Indonesia bisa mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan beras dengan harga

yang terjangkau.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang juga menjadi hambatan dalam pengelolaan impor beras. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, biaya impor beras menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga beras di tingkat konsumen. Ketidakstabilan ekonomi global, seperti krisis ekonomi atau pandemi, juga berpotensi mengganggu perdagangan internasional dan menghambat proses impor.

3. Tantangan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah

Implementasi kebijakan impor beras melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan lembaga terkait lainnya. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara lembaga-lembaga ini sering kali menjadi hambatan utama. Misalnya, Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam mengestimasi produksi dan kebutuhan beras domestik, sedangkan Kementerian Perdagangan yang menentukan kebijakan impor. Bulog, di sisi lain, berperan dalam pelaksanaan impor dan pengelolaan stok beras nasional (Juliashar et al., 2024).

Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menyebabkan perbedaan data dan proyeksi kebutuhan beras antara lembaga-lembaga tersebut, yang pada akhirnya menghambat pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berbasis data akurat. Dalam beberapa kasus, ketidaksepakatan antar lembaga pemerintah mengenai volume dan waktu impor beras menyebabkan beras impor masuk ke pasar pada saat yang tidak tepat, misalnya ketika panen raya berlangsung. Hal ini menekan harga beras lokal dan merugikan petani, serta menciptakan ketidakstabilan di pasar domestik.

4. Masalah Tata Kelola dan Transparansi

Masalah tata kelola dalam implementasi kebijakan impor beras juga menjadi hambatan signifikan. Proses pengambilan keputusan impor sering kali kurang transparan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti asosiasi petani, akademisi, atau masyarakat sipil. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan beras impor, yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Kasus penyimpangan dalam impor beras, seperti penunjukan importir yang tidak transparan, mark-up harga, atau manipulasi data produksi domestik, sering kali mencuat ke permukaan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pangan pemerintah. Kurangnya akuntabilitas dalam proses pengelolaan stok beras oleh Bulog juga sering menjadi sorotan. Beras impor yang disimpan dalam waktu lama di gudang Bulog sering kali mengalami penurunan mutu, sehingga tidak layak konsumsi dan harus dijual dengan harga diskon atau bahkan dibuang.

5. Dampak Negatif terhadap Petani Lokal

Impor beras dalam jumlah besar dapat menekan harga beras domestik, yang berdampak langsung pada pendapatan petani lokal. Ketika harga beras turun, petani kesulitan menutup biaya produksi, yang sering kali sudah tinggi akibat mahalnya pupuk, pestisida, dan input pertanian lainnya. Kondisi ini memaksa banyak petani untuk mengurangi luas tanam atau bahkan beralih profesi, yang berpotensi mengurangi kapasitas produksi beras nasional di masa depan.

Rendahnya harga beras juga menurunkan insentif bagi petani untuk berinvestasi dalam teknologi dan praktik pertanian yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Petani kecil yang umumnya memiliki akses terbatas terhadap modal menjadi kelompok yang paling rentan terdampak oleh kebijakan impor beras. Kondisi ini memperparah siklus kemiskinan di pedesaan dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani (Kosmiko & Fakrulloh, 2022).

Selain itu, kebijakan impor yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek sering kali tidak mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang sektor pertanian. Pemerintah seharusnya lebih berfokus pada penguatan produksi domestik melalui program

dukungan teknis, pelatihan, serta akses yang lebih luas terhadap pasar dan permodalan. Tanpa adanya pendekatan yang komprehensif ini, ketahanan pangan Indonesia akan terus bergantung pada kebijakan impor yang rentan terhadap berbagai risiko eksternal.

6. Keterbatasan Infrastruktur dan Logistik

Implementasi kebijakan impor beras juga dihadapkan pada masalah infrastruktur dan logistik yang belum memadai. Proses distribusi beras impor dari pelabuhan ke gudang penyimpanan dan kemudian ke pasar membutuhkan sistem transportasi yang efisien dan andal. Namun, masalah seperti buruknya kondisi jalan, keterbatasan kapasitas gudang, dan sistem logistik yang belum optimal sering kali menghambat distribusi beras secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Keterbatasan infrastruktur penyimpanan, terutama di daerah-daerah terpencil dan kepulauan, menyebabkan tingginya biaya transportasi dan distribusi. Hal ini dapat memengaruhi harga beras di tingkat konsumen, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, ketidakcukupan fasilitas penyimpanan dengan standar yang memadai sering kali menyebabkan beras mengalami kerusakan selama proses penyimpanan, yang pada akhirnya mengurangi kualitas beras yang sampai ke tangan konsumen.

Masalah logistik ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan pasokan beras antar wilayah, di mana beberapa daerah mengalami surplus sementara daerah lain kekurangan pasokan. Kondisi ini mempersulit pemerintah dalam mengatur distribusi beras yang adil dan merata, serta memastikan stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia.

7. Dinamika Politik dan Tekanan Kepentingan

Kebijakan impor beras sering kali menjadi isu sensitif yang melibatkan banyak kepentingan politik dan ekonomi. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen yang menginginkan harga beras yang terjangkau dan kepentingan petani yang membutuhkan harga jual yang layak. Di sisi lain, kebijakan impor sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, seperti importir, pedagang besar, dan lobi industri, yang memiliki kepentingan ekonomi dalam proses impor beras (Choudhary et al., 2022).

Dinamika politik ini sering kali mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan menciptakan ketidakstabilan dalam kebijakan pangan. Misalnya, keputusan untuk melakukan impor beras sering kali diambil dengan mempertimbangkan kepentingan politik jangka pendek, seperti menghadapi inflasi atau meredam gejolak sosial, tanpa memikirkan dampaknya terhadap keberlanjutan sektor pertanian domestik. Tekanan politik juga bisa memicu intervensi berlebihan dalam penentuan volume dan waktu impor, yang tidak selalu sejalan dengan kondisi pasar dan kebutuhan aktual.

8. Hambatan dalam Pengawasan dan Pengendalian Kualitas

Salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan impor beras adalah pengawasan dan pengendalian kualitas beras yang diimpor. Beras impor harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk bebas dari kontaminasi bahan kimia berbahaya, hama, dan penyakit. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga pengawas, fasilitas laboratorium, serta prosedur yang kurang efektif.

Kualitas beras impor yang tidak terjamin dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan impor beras. Selain itu, beras dengan kualitas rendah yang dijual dengan harga murah dapat mengganggu harga beras lokal yang memiliki kualitas lebih baik, sehingga memengaruhi preferensi konsumen dan berpotensi merugikan petani lokal.

Strategi Kebijakan yang Dapat Dioptimalkan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Impor Beras

Ketahanan pangan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas utama bagi Indonesia,

mengingat beras adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk. Meskipun impor beras sering menjadi solusi cepat dalam mengatasi kekurangan pasokan, ketergantungan berlebihan pada impor beras berisiko melemahkan sektor pertanian domestik dan mengganggu ketahanan pangan jangka panjang. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang efektif harus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dioptimalkan (Doliente & Samsatli, 2021):

1. Penguatan Produksi Beras Domestik

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan impor beras adalah ketidakakuratan data produksi, konsumsi, dan stok beras dalam negeri. Data yang tidak sinkron antara berbagai lembaga sering kali mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan impor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi dan data pangan yang terintegrasi dan real-time

Pemerintah dapat membangun platform digital terpadu yang mengintegrasikan data dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta pihak swasta dan asosiasi petani. Sistem ini harus mampu memantau kondisi produksi padi di berbagai daerah, prediksi cuaca, luas tanam, dan stok beras yang tersedia. Penggunaan teknologi seperti satelit, drone, dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu dalam memantau secara langsung kondisi lahan pertanian dan memperkirakan hasil panen dengan lebih akurat.

Dengan sistem informasi yang akurat dan up-to-date, pemerintah dapat mengambil keputusan impor yang lebih tepat waktu dan sesuai kebutuhan, sehingga menghindari impor yang berlebihan atau terlambat. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait impor beras.

2. Diversifikasi Sumber Pangan dan Pengurangan Ketergantungan pada Beras

Ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras sebagai sumber utama karbohidrat perlu dikurangi melalui diversifikasi sumber pangan. Pemerintah dapat mendorong konsumsi pangan lokal seperti jagung, singkong, sagu, dan ubi yang juga kaya akan karbohidrat dan nutrisi lainnya. Diversifikasi ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap permintaan beras, tetapi juga mendukung ketahanan pangan yang lebih beragam dan bernutrisi (Suryana, 2014).

Untuk mengoptimalkan strategi ini, pemerintah perlu meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan melalui kampanye kesadaran gizi. Selain itu, perlu ada pengembangan industri pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk alternatif beras di pasar.

Diversifikasi juga memerlukan dukungan kebijakan harga yang kompetitif untuk pangan alternatif, subsidi, dan bantuan teknis kepada petani yang menanam komoditas selain padi. Dengan cara ini, ketergantungan pada impor beras dapat dikurangi, dan masyarakat didorong untuk mengadopsi pola konsumsi yang lebih sehat dan beragam.

3. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Sektor Pertanian

Untuk mengurangi kebutuhan impor beras, peningkatan produktivitas padi dalam negeri harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan varietas padi unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, hama, dan penyakit. Penggunaan teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi hemat air, mekanisasi, serta pemupukan dan pengendalian hama yang tepat, juga harus ditingkatkan.

Program pelatihan dan pendampingan teknis kepada petani untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menggunakan teknologi pertanian modern harus terus dilakukan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan.

Selain itu, reformasi tata kelola agraria diperlukan untuk memastikan akses petani terhadap lahan yang produktif. Penyediaan akses permodalan yang lebih mudah, seperti kredit berbunga rendah dan skema asuransi pertanian, juga dapat membantu petani

meningkatkan skala usaha dan mengurangi risiko gagal panen. Peningkatan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan tani, dan gudang penyimpanan, juga harus menjadi fokus utama untuk mendukung efisiensi distribusi dan pemasaran hasil panen.

4. Penguatan Peran Bulog dalam Pengelolaan Stok dan Distribusi Beras

Badan Urusan Logistik (Bulog) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di Indonesia. Untuk mengoptimalkan peran Bulog, diperlukan pembenahan dalam pengelolaan stok beras nasional dan distribusinya. Bulog harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menyerap surplus produksi padi dalam negeri pada saat panen raya dan merilis stok cadangan pada saat terjadi kelangkaan atau lonjakan harga (Jalilov et al., 2022).

Bulog perlu meningkatkan efisiensi operasional, termasuk melalui modernisasi fasilitas penyimpanan untuk mengurangi kehilangan dan penurunan kualitas beras selama proses penyimpanan. Penerapan teknologi pengelolaan gudang berbasis digital dapat membantu Bulog dalam memantau kondisi stok beras secara real-time dan meminimalkan risiko kerusakan.

Selain itu, Bulog harus diberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan waktu dan volume impor berdasarkan situasi pasar domestik, dengan tetap mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Transparansi dalam proses pengadaan beras impor, termasuk tender dan penunjukan importir, harus ditingkatkan untuk menghindari praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

5. Pengembangan Kerja Sama Internasional dan Diplomasi Pangan

Dalam menghadapi volatilitas pasar beras global, pengembangan kerja sama internasional dan diplomasi pangan menjadi strategi penting. Indonesia dapat memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara pengekspor beras utama, seperti Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan, melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang menguntungkan kedua belah pihak.

Perjanjian dagang yang mengatur pasokan beras dalam kondisi darurat, seperti kekeringan atau bencana alam, dapat memberikan jaminan pasokan beras yang stabil dan harga yang lebih kompetitif. Indonesia juga perlu terlibat aktif dalam forum internasional terkait ketahanan pangan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membangun aliansi strategis yang dapat membantu menghadapi ketidakpastian pasokan beras global.

Selain itu, diplomasi pangan juga dapat diarahkan pada pengembangan teknologi pertanian dan transfer pengetahuan dari negara-negara maju yang memiliki sektor pertanian yang lebih maju. Kerja sama ini dapat mencakup pelatihan petani, bantuan teknis, serta akses terhadap varietas padi unggul dan teknologi pengolahan hasil pertanian.

6. Reformasi Kebijakan Harga dan Subsidi Pangan

Kebijakan harga dan subsidi yang tidak tepat sering kali menciptakan distorsi di pasar beras dan mempengaruhi kesejahteraan petani. Pemerintah perlu mereformasi kebijakan harga beras dengan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang adil bagi petani dan konsumen. HPP harus mampu memberikan insentif yang cukup bagi petani untuk terus menanam padi, namun tidak terlalu tinggi sehingga membebani konsumen (Wabbeh et al., 2022).

Subsidi yang diberikan kepada petani, seperti subsidi pupuk dan benih, harus dievaluasi dan disesuaikan agar lebih tepat sasaran. Sistem distribusi subsidi yang selama ini sering bermasalah, seperti penyelewengan dan keterlambatan distribusi, harus dibenahi dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah dapat menerapkan sistem e-subsidy berbasis kartu tani yang terintegrasi dengan data petani untuk memastikan bahwa subsidi tepat diterima oleh petani yang berhak.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan subsidi harga pada konsumen miskin melalui skema bantuan langsung atau program jaminan sosial lainnya.

Ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap pangan pokok, tanpa harus melakukan intervensi harga yang berdampak negatif pada petani.

7. Peningkatan Transparansi dan Tata Kelola Impor

Untuk menghindari praktik-praktik penyimpangan dalam kebijakan impor beras, transparansi dan tata kelola yang baik harus menjadi fokus utama. Proses pengambilan keputusan mengenai impor, mulai dari penentuan volume, waktu, hingga pemilihan importir, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi digital, seperti sistem e-procurement dan platform pelaporan publik, dapat membantu meminimalkan potensi penyimpangan.

Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, akademisi, dan asosiasi petani dalam proses pengambilan keputusan terkait impor beras. Partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya kelompok tertentu.

Audit secara berkala terhadap pelaksanaan impor beras juga perlu dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Laporan hasil audit harus dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik.

8. Penguatan Cadangan Pangan Darurat dan Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko terhadap gangguan pasokan beras, seperti bencana alam atau krisis internasional, memerlukan penguatan cadangan pangan darurat yang dikelola secara efisien. Pemerintah harus memastikan bahwa cadangan beras nasional selalu dalam kondisi siap pakai, dengan kualitas yang terjaga.

Selain cadangan fisik, pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme cadangan finansial untuk menghadapi situasi darurat yang memerlukan pengadaan beras cepat. Asuransi pangan dan mekanisme stabilisasi harga melalui pasar berjangka dapat menjadi instrumen tambahan dalam pengelolaan risiko pangan (Simatupang & Peter Timmer, 2008).

Pemerintah perlu terus memonitor perkembangan harga dan pasokan beras di pasar global serta memiliki strategi mitigasi yang siap diimplementasikan. Ini termasuk pengaturan pengiriman impor yang lebih fleksibel dan koordinasi dengan negara-negara mitra untuk mengamankan pasokan jika terjadi gangguan signifikan.

KESIMPULAN

Kebijakan impor beras di Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil untuk memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras di pasar domestik. Meskipun kebijakan ini dapat membantu mengatasi kekurangan pasokan beras akibat faktor-faktor seperti perubahan iklim, bencana alam, dan fluktuasi produksi, penting untuk diingat bahwa ketergantungan berlebih pada impor dapat mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi kebijakan impor dengan upaya peningkatan produktivitas pertanian domestik, diversifikasi sumber pangan, dan penguatan infrastruktur pertanian menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.

Lebih lanjut, implementasi kebijakan impor beras harus dilakukan dengan mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan sistem informasi pangan dan pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan beras saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk ketahanan pangan di masa depan. Sehingga, kebijakan impor beras dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, D. (2021). Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan. *Jurnal Pangan*, 30(2), 75-86.
- Aziza, L., Zidan, M., Oktavia, T., & Febriansyah, F. (2024). Dampak Kebijakan Impor Beras terhadap Petani Lokal Jember. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 345-350.
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79.
- Choudhary, D., Banskota, K., Khanal, N. P., McDonald, A. J., Krupnik, T. J., & Erenstein, O. (2022). Rice subsector development and farmer efficiency in Nepal: implications for further transformation and food security. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, 740546.
- Darma, S., Pusriadi, T., Syaharuddin, Y., & Darma, D. C. (2020). Indonesia government's strategy for food security: During the covid-19 period. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(04), 10338-10348.
- Doliente, S. S., & Samsatli, S. (2021). Integrated production of food, energy, fuels and chemicals from rice crops: multi-objective optimisation for efficient and sustainable value chains. *Journal of Cleaner Production*, 285, 124900.
- Jalilov, S. M., Rahman, W., Palash, S., Jahan, H., Mainuddin, M., & Ward, F. A. (2022). Exploring strategies to control the cost of food security: Evidence from Bangladesh. *Agricultural Systems*, 196, 103351.
- Juliashar, F., Tatimah, K., Abiyyah, N. A. S., & Wikansari, R. (2024). PENGARUH IMPOR BERAS ASAL THAILAND DAN VIETNAM TERHADAP KESTABILAN HARGA BERAS DI INDONESIA. *AGRORADIX: Jurnal Ilmu Pertanian*, 7(2), 1-11.
- Kosmiko, N., & Fakrulloh, Z. (2022, January). Indonesian Agricultural Law Politics in Facing Global Challenges. In *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia*.
- Kurniawan, F. A. A., Ramdhani, I., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Impor Beras dalam Konteks Pemenuhan Pangan Nasional di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 15-15.
- McCulloch, N., & Peter Timmer, C. (2008). Rice policy in Indonesia: a special issue. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 33-44.
- Prabowo, A., & Pudjianto, M. (2023). Logistics costs of rice and soybean: Issues, challenges, and the impact of regulations (No. 58). *Policy Paper*.
- Suryana, A. (2014). Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 32, No. 2, pp. 123-135)*.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35-48.
- Simatupang, P., & Peter Timmer, C. (2008). Indonesian rice production: policies and realities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 65-80.
- Sutardi, Apriyana, Y., Rejekiningrum, P., Alifia, A. D., Ramadhani, F., Darwis, V., ... & Fadwiwati, A. Y. (2022). The transformation of rice crop technology in indonesia: Innovation and sustainable food security. *Agronomy*, 13(1), 1.
- Wahbeh, S., Anastasiadis, F., Sundarakani, B., & Manikas, I. (2022). Exploration of food security challenges towards more sustainable food production: A systematic literature review of the major drivers and policies. *Foods*, 11(23), 3804.
- Widiana, A., Wijaya, C., & Atmoko, A. W. (2022). The Challenges of Food Security Policy in Indonesia: Lesson Learned from Vietnam, India, and Japan. *Technium Soc. Sci. J.*, 33, 1.